

Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan *Value For Money* di Desa
Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapanuli Tengah

¹Siti May Sarah Tinambunan, ²M. Ridwan, ³Rahmat Daim Harahap

^{1,2,3}Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Medan

Email : [1maysarahsiti061@gmail.com](mailto:maysarahsiti061@gmail.com), [2mridwanku@gmail.com](mailto:mridwanku@gmail.com),
[3rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id](mailto:rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author: maysarahsiti061@gmail.com

Abstract : *The public sector is an important aspect of government in facing the economy in the future. Including the smallest category, namely village accounting as a public sector application that also needs to be considered. The public sector has demands to carry out accountability of public funds. In assessing the performance of the village government through the realization of the budget and expenditure reports can be a review for the village to realize good governance. Performance appraisal using value for money measurement, the author focuses on economic measurement, efficiency and effectiveness. The purpose of this study was to determine the management of village funds based on value for money in the village of Sitio-TioHilir, in assessing the financial performance of the government desa Sitio-Tio Hilir Central Tapanuli. The method used is qualitative descriptive, from the results of research using value for money measurement it can be concluded that the financial performance of the village government is not optimal and continues to strive to improve its performance. In terms of economy for three years from 2019-2021 is in the economic category. In terms of efficiency, 2019-2020 is inefficient, but 2019 and 2021 are efficient. In terms of effectiveness, 2019 and 2020 were quite effective, while 2018 was effective.*

Keywords: *Performance, Village Fund, Value For Money.*

I. Pendahuluan

Dari tahun 2019 hingga 2021 pencapaian penerimaan mengalami peningkatan, sedangkan capaian belanja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, 93% pendapatan dan 90,51% pengeluaran telah terealisasi. Pada tahun 2020, pendapatan meningkat 97,69% sedangkan pengeluaran meningkat 97,17%. Pendapatan terealisasi 119,92 persen pada 2021, tetapi pengeluaran turun menjadi 89,36 persen dari tahun sebelumnya. Karena ada pendanaan dalam bentuk SiLPA untuk periode bersangkutan yang masih perlu diambil Pemerintah Desa dalam periode selanjutnya, maka anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan. mengakibatkan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja. Selain itu, realisasi belanja desa pada tahun 2020 melebihi pendapatan sebenarnya sebab tidak cukup perencanaan dan kontrol atas uang yang dikeluarkan untuk barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa. Ini tentang mencapai tujuan dengan sumber daya dan sumber daya sesedikit mungkin.

Pengelolaan keuangan desa menentukan efektifitas dan efisiensi kinerja keuangannya; pengelolaan yang baik akan berpengaruh pada kinerja keuangan desa.

Sedangkan efektivitas kinerja keuangan desa ini menggambarkan kemampuan pemerintahan desa saat merealisasikan dan mengolah keuangan desa, efisiensi kinerja ekonomi desa ini dapat menjadi gambaran pertimbangan dana yang digunakandalam mendapatkan penghasilan sesuai realisasi penerimaan penghasilan tersebut.

Mengenai dampak pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan, yang menjadi pokok kajian adalah kantor kepala desa di Desa Sitio-Tio Hilir Kecamatan Pandan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan desa Sitio-tio Hilir dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa. Karena kinerja keuangan desa Sitio-tio Hilir dapat dikatakan ekonomis kinerja keuangannya jika dana yang ada dikelola secara lebih transparan dan efektif.

II. Landasan Teori

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang diperoleh atas APBN dan diperuntukkan bagi desa. Setiap periode dana tersebut disalurkan dari APBD Kabupaten/Kota dalam membiayai pembentukan wewenang desa berlandaskan hak asal usul serta wewenang lokal berskala desa. Pengalokasian dana desa yakni salah satu pemberian pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintah pusat mendistribusikan dana desa tiap tahun kepada pemerintah tersebut. Alokasi tahunan dana desa akan tetap berjalan sesuai dengan UU No. 6 periode 2004 (Hizkia, 2018). Dana desa sebenarnya ditujukan agar melanjutkan program bantuan desa yang telah dirintis dalam periode 1969.

Konsep dan Sumber Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah no. Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 60 Tahun 2014 dibagi secara adil berdasarkan alokasi dasar, yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis di setiap desa kabupaten kota. (Kemenkeu 2020) Proses pencairan Dana Desa dipisah dengan 2 langkah:

1. Ada dua proses yaitu transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Sebelum RKUD dapat menerima dana dari desa, dan pemerintah desa sebelum dapat ditransfer ke rekening desa, Pemerintah Daerah harus memenuhi beberapa syarat. Sebelum mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) harus memiliki akses dokumen dari Pemerintah Daerah.
2. Aturan yang dibuat oleh walikota dan bupati tentang bagaimana membagi dan berapa banyak uang yang didapat desa.
3. Setelah menerima dana dari RKUD, Pemkab/Kota wajib mentransfernya ke rekening desa dalam waktu tujuh hari. Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa Tentang APBDes dan Laporan Realisasi Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana ke rekening desa.

Secara khusus Pasal 72 UU No. 6 Periode 2014 menyebutkan bahwasannya penghasilan berasal atas beberapa sumber:

1. Alokasi Pendapatan Asli Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Pada tingkat Kabupaten/Kota, setengah penghasilan pajak serta retribusi daerah.
3. Penyaluran dana Desa yang menjadi komponen dana perimbangan kabupaten/kota.
4. Sokongan dana oleh APBD Kabupaten/Kota serta APBD provinsi.
5. Sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang sifatnya tidak wajib.
6. Sumber pendapatan lain
Semua uang yang disetorkan ke rekening desa diperhitungkan sebagai pendapatan desa yang merupakan hak desa selama satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Kategori berikut merupakan penghasilan desa:
 1. Penghasilan Asli Desa (PADes)
 1. Hasil usaha desa meliputi: Bumdes, tanah untuk kas desa
 2. Hasil kekayaan desa meliputi:
 3. Swadaya, partisipasi, serta gotong royong
 4. Penghasilan Asli Desa Lainnya
 5. Pasar Desa, Pemandian Umum, serta Jaringan Irigasi
 6. Dana transfer
 - a. Dana Desa
 - b. Proporsi pendapatan dan belanja pajak daerah kota serta daerah.
 - c. Penyaluran Dana Desa.
 7. Penghasilan lainnya
Sumbangan serta hibah dari pihak ketiga yang sifatnya tak wajib.

Kinerja Keuangan

Kapasitas keuangan mengacu ke implementasi, kebijakan, dan kesuksesan program organisasi saat menggapai visi, misi, serta maksudnya. Apabila melakukan berbagai analisis, analisa kapasitas keuangan terutama termaksud dalam menguji kapasitas sebelumnya agar mendapatkankondisi keuangan yang secara akurat menggambarkan realita entitas serta kemampuan kinerja di masa depan.

Indikator kinerja yang memanfaatkan indikator keuangan adalah kinerja keuangan. Penilaian kapasitasyaitu sebagianmedia yang dipakaidalam mengukur kesuksesan suatu organisasi. Pencapaian otoritatif bisa dipergunakan dalam memperoleh keaslian serta sokongan publik sehubungan dengan asosiasi area publik. Organisasi di sektor publik akan dinilai berdasarkan kapasitasnya untuk menyediakan layanan publik berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar oleh masyarakat umum.

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Dalam organisasi sektor publik, pengukuran kinerja memiliki tujuan sebagai berikut, menurut Mahmudi (2019):

1. Menyadari sejauh mana tujuan yang ditetapkan oleh organisasi telah tercapai.
2. Menyediakan karyawan dengan sumber belajar.
3. Meningkatkan efisiensi untuk periode berikutnya.
4. Memberikan keputusan penghargaan dan hukuman pertimbangan yang sistematis.
5. Motivasi karyawan.
6. Menanamkan tanggung jawab

Keuntungan mengukur kinerja bagi instansi pemerintah (Mardiasmo, 2009:122) yakni:

1. Berikan pengetahuan tentang tindakan yang dipergunakan dalam mensurvei pelaksanaan eksekutif.
2. Menyediakan arahan agar tujuan kapasitas yang sudah ditentukan dapat terpenuhi.
3. Agar melacak serta menguji hasil kinerja, membandingkannya dalam sasaran, dan menemukan cara baru untuk meningkatkan kinerja.
4. Menjadi dasar penyerahan penghargaan dan teguran yang objektif berdasarkan kemampuan yang dinilai melalui metode penentuan kinerja yang terstandar
5. Untuk memudahkan interaksi antar pimpinan serta bawahan guna meningkatkan kinerja organisasi.
6. Menolong dalam menentukan apakah kesenangan konsumen telah tercapai.
7. Mempermudah pemahaman tentang prosedur institut pemerintahan.
8. Mengakui bahwasannya putusan dibuat dengan obyektif.

Kinerja sektor publik diukur karena 3 alasan berikut:

1. Tujuan penilaian kinerja di sektor publik adalah agar menolong pemerintahan dalam berkonsentrasi pada tujuan program unit kerja yang dimaksud. Efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dapat meningkat sebagai hasilnya.
2. Di sektor publik, ukuran kinerja digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan menghasilkan kinerja.
3. Nilai kinerja sektor publik ditujukan dalam meningkatkan komunikasi kelembagaan serta mewujudkan akuntabilitas publik.

Value For Money

Dari Mardiasmo (2018: 120) *value for money* yaitu gagasan bahwa institusi sektor publik harus dikelola berlandaskan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. *Value For Money* yaitu sesuatu yang perlu diamati para organisasi sektor publik pada aktivitasnya. *Value for Money* yaitu konsep pengelola sektor publik berdasarkan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi (Ritonga P, 2021:32).

Tujuan dan Manfaat *Value For Money*

Ekonomi adalah tujuan penerapan nilai uang; pemakaian sumber daya yang efektif. Keberhasilan saat menggapai maksud serta target adalah efektivitas. Berikut ini adalah tujuan tambahan yang harus dicapai ketika nilai uang diterapkan:

1. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memastikan bahwa pelayanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus.
2. Memaksimalkan standar layanan umum.
3. Mengurangi pengeluaran layanan umum dengan menghilangkan inefisiensi serta mengurangi konsumsi input.
4. Pengalokasian belanja yang lebih mengutamakan kebutuhan umum.
5. Membuat masyarakat semakin sadar bahwa dana publik merupakan landasan akuntabilitas publik.

Manfaat Penerapan metode pengukuran nilai-untuk-uang dalam keuangan pemerintah bermanfaat bagi masyarakat dan organisasi secara keseluruhan.

Diantisipasi bahwa organisasi sektor publik akan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif serta pengadaan dan alokasi sumber daya yang hemat biaya sebagai hasil dari penerapan nilai uang (Mardiasmo, 2018: 103).

Berikut adalah keuntungan yang diantisipasi dari penerapan nilai untuk uang:

1. Memaksimalkan efisiensi layanan umum yang berarti memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
2. Memaksimalkan standar layanan umum.

Meminimalkan pengeluaran kapasitas, inefisiensi, serta kemacetan input di sektor publik. Melayani kepentingan publik adalah fokus utama alokasi sumber daya. mewujudkan akuntabilitas publik dengan meningkatkan kesadaran publik akan dana publik. Penggunaan value for money dalam penentuan kinerja yang memungkinkan terciptanya pelayanan yang berkualitas atas pemanfaatan pembiayaan yang hemat biaya dan efisien begitu menyokong institusi pemerintahan dalam melayanirakyat secara benar dan sesuai sumber. Keuntungan sebelumnya mendukung kesimpulan ini.

III. Metode Penelitian

Kajian terkait memakai metodologi deskriptif untuk mengakumulasi serta menyediakan informasi atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019-2021.

Sugiyono (2019:16) menegaskan teknik kajian kuantitatif yaitu metodologi penelitian positivistis yang dipergunakan dalam mempelajari populasi ataupun sampel, mengakumulasi informasi melalui instrumen, serta menguji hipotesis yang sudah ada sebelumnya melalui analisis data kuantitatif atau statistik.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018:89) merupakan solusi dari pertanyaan apakah ada variabel independen (variabel yang berdiri sendiri) yang hanya mempengaruhi satu variabel atau lebih. Akibatnya, peneliti dalam penelitian ini tidak membandingkan variabel-variabel tersebut dengan sampel lain melainkan menyelidiki hubungannya dengan variabel lain. Jenis penelitian ini sekarang dikenal sebagai penelitian deskriptif. Oleh karena itu, data kuantitatif adalah data yang lebih banyak dianalisis dengan menghitung rasio data APBDes.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini bersumber dari laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitio-Tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah periode anggaran 2019-2021. Kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-tio dievaluasi dengan menggunakan laporan di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Anggaran & Realisasi Pendapatan Desa Sitio-Tio Hilir 2019-2021

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran	Raslisasi	Selisih
1	Pendapatan Asli Desa	2019	147.700.000	149.421.000	(3.721.000)
		2020	135.000.000	137.400.210	(2.400.210)
		2021	135.000.000	136.300.210	(1.300.000)
2	Pendapatan Transfer	2019	1.320.121.353	1.129.320.000	190.801.353
		2020	1.091.183.006	1.091.183.006	0
		2021	1.102.360.000	1.102.360.000	0

No	Pendapatan	Tahun	Anggaran	Raslisasi	Selisih
3	Pendapatan Lain-lain	2019	23.050.000	21.200.000	1.950.000
		2020	27.500.000	23.200.000	4.300.000
		2021	26.305.000	26.305.000	0

Sumber Data desa Sitio-Tio Hilir

Tabel di atas memberikan informasi anggaran dan pendapatan desa Sitio-Tio Hilir tahun 2019 dan 2021. Pendapatan awal desa berfluktuasi pada tahun 2019 dan 2021. Rp147.700.000,- dibuat pada tahun 2019, mencapai Rp149.421.000. Turun menjadi Rp 135.000.000 pada tahun 2020 dan mencapai Rp. 137.400.210. Rencana Belanja Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan pada tahun 2021 dengan anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya, namun potensi kota dapat dikembangkan lebih lanjut. Pendapatan transfer desa yang diperkirakan akan diterima pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.102.360.000. Pendapatan transfer desa yang diperkirakan akan diterima pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.102.360.000. Pemerintah Desa telah mampu menekan pengeluaran atas anggaran yang diterimanya dengan memanfaatkan pendapatan transfer. Sumber pendapatan lain juga beragam. Rp 23.050.000 pada tahun 2019, atau Rp 21.100.000. Akan menjadi Rp 27.500.000 di tahun 2020, yang sebenarnya Rp 23.200.000, dan Rp 26.305.000 di tahun 2021, tetap sama Rp. 26.305.000.

Tabel 2. Rincian Anggaran & Realisasi BelanjaDesa Sitio-Tio Hilir 2019-2021

No	Belanja	Tahun	Anggaran	Raslisasi	Selisih
1	Bidang enyelenggaraan pemerintah Desa	2019	400.778.00 0	364.457.82 0	36.320.180
		2020	502.600.0 00	77.450.000	25.150.200
		2021	630.000.17 8	583.819.85 8	46.180.320
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2019	300.15 0.320	227.120.42 0	73.029.900
		2020	421.530.17 8	365.879.99 8	55.650.180
		2021	331.139.00 0	219.439.00 0	111.700.000
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2019	32.000.00 0	32.000.00 0	0
		2020	32.000.00 0	32.000.00 0	0
		2021	26.305.000	36.000.00 0	(9.695.000)
4	Bidang penanggulangan & mendesak desa	2019	250.180.00 0	0	250.180.000
		2020	0	0	0
		2021	344.138.00 0	0	344.138.000

Sumber Data desa Sitio-Tio Hilir

Berdasarkan tabel diatas yang menggambarkan kesepakatan anggaran dan realisasi belanja desa Sitio-tio hilir dari tahun 2019 hingga 2021, anggaran belanja berfluktuasi di setiap sektor sehingga terjadi pengeluaran yang tidak menentu. Pemerintah Desa dapat menggunakan dana yang diterima untuk masing-masing bidang karena realisasinya lebih rendah dari anggaran. Namun pada sektor pemberdayaan desa dan masyarakat akan terjadi selisih sebesar (Rp 9.695.000) pada tahun 2021.

Hasil Analisis Pengukuran *Value For Money*
Pengukuran Ekonomi

Aspek ekonomi menunjukkan bagaimana organisasi sektor publik mengalokasikan biaya untuk menyediakan layanan publik. Komponen keuangan dari suatu program bergantung pada sumber daya yang murah dan berkualitas tinggi. Gagasan di balik pengukuran ekonomi adalah bagaimana mengurangi pengeluaran sektor publik tanpa membuatnya boros atau tidak efektif. Dengan membandingkan persentase pencapaian target dan realisasi anggaran, komponen ekonomi mengukur nilai uang untuk pengelolaan keuangan sektor publik.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{AnggaranBelanja}}{\text{RealisasiBelanja}} \times 100\%$$

Berikut metrik yang digunakan untuk menyusun laporan pencapaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parengan Tahun 2016-2018:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2019} &= \frac{1.320.121.353}{1.194.459.640} \times 100\% \\ &= 110.52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2020} &= \frac{\text{AnggaranBelanja}}{\text{RealisasiBelanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.119.381.600}{1.066.014.420} \times 100\% \\ &= 105.006\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2021} &= \frac{\text{AnggaranBelanja}}{\text{RealisasiBelanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.121.360.000}{1.002.100.000} \times 100\% \\ &= 120.11\% \end{aligned}$$

Tabel 4. Hasil PresentasePengukuran Ekonomi Pemerintahan Desa Sitio-Tio hilir Tahun 2019-2021

Tahun	Hasil Persentase 100%
2019	110.52%
2020	105.06%
2021	120.11%

Pengukuran ekonomi Pemerintah Desa tahun 2019–2021 berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel 4 Target anggaran sebesar Rp 1.119.381.600 yang tidak jauh berbeda dengan realisasi belanja yaitu Rp 1.066.014.420 menghasilkan penurunan sebesar 5,46 persen antara tahun 2019 dan 2021 yang semula 110,52% menjadi 105,06%. Peningkatan

pada tahun 2021 sebesar 15,05% yang semula 105,06% menjadi 120,11%. Persentase pada tabel di atas menunjukkan bahwa ukuran ekonomi Pemerintah Desa tahun 2019-2021 dinilai ekonomis karena berada di atas 100%.

Pengukuran Efisiensi

Kemampuan organisasi sektor publik untuk mengelola sumber daya dan anggaran paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran merupakan faktor efisiensi. Perbandingan input atau Realisasi Pendapatan Desa dan output atau Realisasi Pengeluaran adalah bagaimana efisiensi diukur.

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Pengukuran berikut digunakan untuk membuat laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitio-tio Hilir Tahun 2019-2021:

$$\begin{aligned} \text{Efisien 2019} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.194.459.640}{1.227.800.408} \times 100\% \\ &= 97,28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisien 2020} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.066.014.420}{1.087.772.296} \times 100\% \\ &= 101,60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisien 2021} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.002.100.000}{1.320.994.451} \times 100\% \\ &= 88,45\% \end{aligned}$$

Tabel 5. Hasil Presentase Pengukuran Efisien Pemerintahan Desa Sitio-Tio hilir Tahun 2019-2021

Tahun	Hasil Persentase 100%
2019	97,28 %
2020	101,60 %
2021	88,45 %

Tabel di atas menggambarkan bagaimana efisiensi Pemerintah Desa diukur dari tahun 2019 hingga 2021. Persentase hasil akan meningkat sebesar 0,80% dari 97,28% di awal menjadi 98% antara tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2020, persentasenya menjadi 101,60%. Rasio efisiensi ini termasuk dalam kategori kurang efisien karena nilai pengeluaran yang sebenarnya tidak sebanding dengan pendapatan yang sebenarnya. sehingga jumlah yang sebenarnya diperoleh lebih besar dari jumlah yang sebenarnya dikeluarkan untuk dana desa. Jadi, strategi Value for Money tidak dapat menunjukkan bahwa ia dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan uang yang sudah dikeluarkan. Dengan realisasi pengeluaran sebesar 1.087.772.296 dan anggaran pendapatan sebesar 1.006.014.420 dikatakan kurang efisien karena memiliki persentase lebih dari 100%. Kemudian pada saat itu, pada 2021 akan turun 3,6%, dari 101,60% menjadi 88,45%.

Efisiensi Pemerintah Desa diperkirakan mencapai 97,28% pada tahun 2019 dan 101,60% pada tahun 2020, keduanya lebih tinggi dari 100%, sesuai dengan persentase

pada tabel di atas. Dana pada tahun 2021 dikatakan sangat minim karena jumlahnya kurang dari 90%.

Pengukuran Efektivitas

Di sektor publik, indikator efektivitas adalah berhasil atau tidaknya program, kegiatan, dan organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Unsur efektivitas berkaitan dengan mendapatkan hasil atau tujuan yang dicapai. Efektivitas diukur dengan membandingkan outcome yaitu pendapatan yang direalisasikan dengan output yaitu anggaran pendapatan yang diperoleh.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitio-tio Hilir tahun 2019-2021 berdasarkan pengukuran di atas:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2019} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.227.800.408}{1.320.121.353} \times 100\% \\ &= 93,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2020} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.087.772.296}{1.091.183.006} \times 100\% \\ &= 99,68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2021} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{1.132.994.451}{1.102.360.000} \times 100\% \\ &= 119,83\% \end{aligned}$$

Tabel 6. Hasil Presentase Pengukuran Eftivitas Pemerintahan Desa Sitio-Tio hilir Tahun 2019-2021

Tahun	Hasil Persentase 100%
2019	93,06%
2020	99,68 %
2021	113,83 %

Berdasarkan tabel 6 ukuran efektivitas Pemerintahan Desa tahun 2019–2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 93,06% pada 2019 menjadi 99,68% pada 2021, persentasenya meningkat 6,62%, kemudian sebesar 14% dari 99,68% menjadi 113,83% pada 2020.

Persentase pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas Pemerintah Desa tahun 2019 dinilai cukup efektif karena berkisar antara 85% hingga 99%. Setelah itu, pada tahun 2020 persentase ini naik menjadi 99,68% yang dinilai cukup efektif. Persentasenya akan meningkat menjadi 113,83% pada 2021, sehingga efektif lebih dari 100%.

Hasil Interpretasi Data

Pengukuran value for money dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa berdasarkan

temuan analisis pengukuran yang telah dibahas sebelumnya. Pengeluaran anggaran dan pengeluaran aktual dibandingkan dari sudut pandang ekonomi. Sejauh produktivitas, pengakuan penggunaan dan pengakuan gaji kota dipertimbangkan, dan sejauh kecukupan, pengakuan pembayaran dan rencana keuangan pembayaran dipikirkan. Estimasi hipotetis digunakan untuk membuat estimasi. Hasil analisis yang dilakukan berdasarkan catatan pertanggungjawaban keuangan pada laporan realisasi APBDes Pemerintah Desa tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Hasil Pengukuran *Value For Money* Pada Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa Sitio-Tio Hilir Tahun 2019-2021

Pengukuran <i>Value For Money</i>	2019	2020	2021
Ekonomi	110,52%	105,06%	120,11%
Kriteria	Ekonomis	Ekonomis	Ekonomis
Efisien	97,28%	101,60%	88,45%
Kriteria	Efisien	Kurang Efisien	Cukup Efisien
Efektivitas	93,06%	99,68%	119,83%
Kriteria	Cukup efektif	Cukup efektif	Efektif

Dengan menggunakan akuntansi sektor publik, prinsip nilai uang seperti ekonomi, efikasi, dan efisiensi dapat diimplementasikan. Dalam organisasi sektor publik, pengukuran nilai uang mengatur pengelolaan pentingnya menghargai nilai setiap rupiah dana masyarakat.

Hasil pengukuran nilai uang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada saat mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir selama tiga tahun anggaran, 2019-2021, dirinci dalam tabel 4.6 yang menjadi dasar untuk interpretasi data berikut ini:

1. Aspek Ekonomi

Kinerja keuangan pemerintah Desa Sitio-tio hilir termasuk dalam kategori ekonomi karena persentase pendapatannya lebih besar dari 100%, seperti terlihat pada tabel yang mengukur nilai ekonomi uang selama tiga tahun anggaran 2019-2021. Persentase hasil yang ditunjukkan di sini adalah 110,52% pada tahun 2019, 105,06% pada tahun 2020, dan 120,11% pada tahun 2021. Semakin baik konversi anggaran input primer menjadi tenaga kerja input sekunder untuk bahan infrastruktur untuk melakukan kegiatan dan menghindari pengeluaran yang boros, semakin tinggi pendapatan ekonomi. persentase.

Di organisasi sektor publik, ekonomi dipengaruhi oleh anggaran yang dihemat untuk akuisisi input. Pemerintah desa telah menabung untuk membiayai kegiatan tertentu jika ekonomi tumbuh lebih dari 100% selama tiga tahun 2019-2021. Jika jumlah sumber daya yang digunakan kurang dari anggaran, penghematan dikatakan dilakukan. Tujuan dari aspek keuangan adalah untuk melaksanakan program dengan pengadaan sumber daya yang murah dan berkualitas tinggi. Suatu kegiatan akan

dianggap ekonomis jika mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

2. Aspek Efisiensi

Tabel *Value for Money* Pengukuran efisiensi Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) digunakan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. memperluas perolehan hasil pada tingkat yang lebih penting daripada tingkat input yang diperluas, efektivitas dapat diperluas. Kinerja keuangan akan meningkat pada 2019, 2020, dan 2021. Karena berada pada kisaran 100% hingga 110%, persentase masing-masing sebesar 97,28% dan 101,60% dinilai kurang efektif. Konsep produktivitas disebut sebagai "efisiensi". Dengan mencapai tujuan program dengan sumber daya dan dana sesedikit mungkin, sebuah organisasi dapat menjadi lebih efisien. Semakin besar efisiensi organisasi sektor publik, semakin besar output dari input tersebut atau semakin rendah input yang digunakan untuk mencapai output tersebut.

3. Aspek Efektivitas

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-tio Hilir tahun 2019 dengan perolehan sebesar 93,06% dinilai cukup efektif karena berada pada kisaran 85% sampai dengan 99%, seperti terlihat pada tabel 4.3 yang mengukur efektivitas *value for money* selama tiga tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021. Berdasarkan kriteria efektivitas, persentase pada tahun 2020 sebesar 99,68%, termasuk dalam kategori cukup efektif. Karena lebih tinggi dari 100% pada tahun 2021, persentase 119,83% dianggap efektif. Selama tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa agar anggaran sejalan dengan tujuan yang dicapai, maka tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tersebut berbanding lurus dengan persentase efektivitas.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan pengukuran nilai uang dalam APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir tahun 2019-2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir tahun 2019-2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah belum optimal dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Kesimpulan ini dapat ditarik dari fakta bahwa Pemerintah Desa Sitio-Ttio Hilir cukup efisien pada tahun 2021 dalam mengukur efisiensi karena dapat menekan pengeluaran berdasarkan input yang diterimanya. Namun, hanya efisiensi, yang cukup untuk mendongkrak kinerja, yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi ekonomi.

Berikut penjelasan tambahan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir 2019-2021 diukur dari nilai uang, terutama ekonomi, efisiensi, dan efektivitas: Dari sisi ekonomi, keuangan Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir kinerja selama tiga tahun anggaran 2019-2021 termasuk dalam kategori ekonomi karena berada pada persentase lebih dari 100%. Akibatnya, semakin baik meminimalkan input utama berupa anggaran untuk melaksanakan kegiatan.

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir dalam hal efisiensi pada tahun 2020 mencapai lebih dari 100%. Dikatakan tidak efisien karena tidak adanya perencanaan dan pengendalian pengeluaran dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa. Akibatnya, realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan

sehingga tidak mengurangi dana anggaran. Namun Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir terus berupaya meningkatkan kinerja keuangan dalam hal efisiensi. Pada tahun 2019 mencapai hasil sebesar 97,28%, dan pada tahun 2021 mencapai hasil sebesar 101,60%, menunjukkan hasil antara lebih dari 90%. Artinya pemerintah dianggap cukup efisien karena jumlah yang dikeluarkan lebih rendah dari jumlah yang diperoleh.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, kinerja keuangan efektif Pemerintah Desa Sitio-Tio Hilir akan terus meningkat, hal ini menunjukkan semakin besar tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

VI. Daftar Pustaka

- Al-Sheikh, A. b. (2004). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i.
- Anugerah eni, N. K. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA DENGAN MENGGUNAKAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2.
- Arikunto. (2017). *Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta.
- Badruzaman, D. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 109.
- Laylan Syafina, N. H. (2019). Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. In *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif* (p. 24). Medan: FEBI UIN-SU Press.
- laylan Syafina, N. h. (n.d.). metode penelitian akuntansi pendekatan Penelitian. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. In *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (p. 299). Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2017). *Kelebihan Pengukuran Kinerja Keuangan*.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mhd. Syahman Sitompul, N. H. (2016). Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Masjid Di Sumatera Utara. *Jurnal Human Falah*, 208.
- Mulyadi. (2020). *Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan*.
- Nordiawan. (2006). In *Asas Pengelolaan Dana Desa Keuangan desa* (p. 35).
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaann Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *Katalogis*, 2.
- R, p. (2021). *Keuangan Negara*. MEDan: UMSU Press.

- Seran, M. S. (2021). Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan KEuangan Desa pada desa Subun Betobe. *Tranparasni*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In Sugiyono. Bandung.
- Sujarweni. (2015). Pembangunan, Rencana.
- Sujarweni. (2018). Akuntansi Sektor Publik.
- Sujarweni. (2018). Sujarweni, 2018 :228. In R. Pembangunan, *Rencana Pembangunan* (p. 228).
- Tapteng. (2015). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)*. Tapteng.
- Undang-Undang. (2014). (Permendagri No.113 Tahun2014 pengelolaan Dana Desa. Jakarta: permendagri.